

PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH STUDI KASUS IMPLEMENTASI SPBE DI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK

Rafi Muhamad Arifudin¹, Dzicky Zulkarnaen², Muhammad Iqbal³, Muhammad Isa Setya Nugraha⁴, Nurhasan⁵
rafiarifudin0@gmail.com¹, dzickyzulkarnaen9@gmail.com², muhamadiqbal7181@gmail.com³,
isasetya13@gmail.com⁴, murayakang@gmail.com⁵
Universitas Swadaya Gunung Jati

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi digital telah menjadi faktor strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah Indonesia mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen utama transformasi digital birokrasi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran teknologi digital dalam pembangunan daerah dengan studi kasus implementasi SPBE di Kota Cirebon menggunakan pendekatan ekologi administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kasus dengan menelaah kebijakan, kondisi kelembagaan, serta lingkungan sosial dan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi digital berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum merata, serta kesenjangan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan daerah yang adaptif dan kontekstual agar pemanfaatan teknologi digital dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Teknologi Digital, Pembangunan Daerah, SPBE, Ekologi Administrasi Publik, Kota Cirebon.

ABSTRACT

The use of digital technology has become a strategic factor in supporting regional development, particularly through improving the quality of governance and public services. The Indonesian government encourages the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) as the main instrument for digital transformation of the bureaucracy. This article aims to analyze the role of digital technology in regional development with a case study of SPBE implementation in the city of Cirebon using a public administration ecology approach. This study uses a descriptive qualitative method based on case studies by examining policies, institutional conditions, and the social and technological environment. The results of the study show that digital technology contributes to improving the efficiency of public services and public access to government services. However, its effectiveness is still influenced by limitations in human resource capacity, uneven digital infrastructure, and gaps in public digital literacy. Therefore, adaptive and contextual regional development policies are needed so that the use of digital technology can be inclusive and sustainable.

Keywords: Digital Technology, Regional Development, SPBE, Public Administration Ecology, Cirebon City.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada era digital tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi digital dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta memperluas partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan SPBE

sebagai bagian dari reformasi administrasi publik dan pembangunan nasional.

Kota Cirebon sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah di Jawa Barat menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kota Cirebon telah mengadopsi berbagai inovasi layanan digital, terutama pada sektor administrasi kependudukan. Namun, pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunan daerah masih menghadapi kendala struktural dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ekologi administrasi publik menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana teknologi digital berinteraksi dengan lingkungan sosial, organisasi, dan kebijakan dalam pembangunan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui kajian literatur terhadap regulasi SPBE, dokumen kebijakan pembangunan daerah, serta jurnal ilmiah terkait teknologi digital dan administrasi publik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka ekologi administrasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus Kota Cirebon

Kota Cirebon merupakan daerah dengan tingkat aktivitas pelayanan publik yang tinggi, khususnya pada sektor administrasi kependudukan. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan publik sebagai bagian dari implementasi SPBE. Digitalisasi layanan ini bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendukung pembangunan daerah yang berbasis pelayanan.

Meskipun demikian, pelaksanaan layanan digital masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, ketergantungan pada stabilitas sistem, serta kesenjangan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran teknologi digital dalam pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal.

Analisis Peran Teknologi Digital dalam Perspektif Ekologi Administrasi Publik

1. Lingkungan Sosial

Keberhasilan pemanfaatan teknologi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan sosial masyarakat. Di Kota Cirebon, perbedaan tingkat pendidikan dan literasi digital masyarakat berdampak pada efektivitas penggunaan layanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah berbasis teknologi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sosial masyarakat.

2. Lingkungan Organisasi dan Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, peran teknologi digital dalam pembangunan daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia aparatur serta koordinasi antar perangkat daerah. Keterbatasan kompetensi teknologi dan belum optimalnya integrasi sistem digital menjadi tantangan utama dalam implementasi SPBE di Kota Cirebon.

3. Lingkungan Teknologi dan Ekonomi

Aspek teknologi dan ekonomi turut memengaruhi keberhasilan digitalisasi pemerintahan daerah. Keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas infrastruktur digital dan keberlanjutan sistem, sehingga memengaruhi peran teknologi digital dalam mendukung pembangunan daerah secara jangka panjang.

Opsi Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Digital Beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan

teknologi informasi, penguatan integrasi sistem pemerintahan digital antar instansi, serta pengembangan strategi literasi digital masyarakat. Opsi kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan kemampuan fiskal daerah agar teknologi digital benar-benar berperan dalam pembangunan daerah

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi utama dari kajian ini adalah perlunya penguatan kebijakan pembangunan daerah berbasis teknologi digital yang mempertimbangkan aspek ekologi administrasi publik. Pemerintah Kota Cirebon perlu mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital dengan pembangunan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Dengan demikian, teknologi digital dapat berperan sebagai instrumen pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar dan Tabel

Tempatkan label tabel di atas tabel, sedangkan label gambar di bagian bawah tabel. Tuliskan tabel tertentu secara spesifik, misalnya Tabel 1, saat merujuk suatu tabel. Contoh penulisan tabel dan keterangan gambar adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Format Tabel

Kepala Tabel	Kepala Kolom Tabel	
	Aspek Ekologi	Kendala Utama
Isi	Linkungan Organisasi	Rendahnya literasi digital masyarakat
1	Lingkungan	Rendahnya Literasi digital masyarakat

Kepala Tabel	Kepala Kolom Tabel	
	Aspek Ekologi	Kendala Utama
2	Lngkungan Organisasi	Keterbatasan Kompetensi SDM aparatur
3	Lingkungan Organisasi	Infrastruktur Digital yang belum merata
4	Lingkunagan Ekonomi	Keterbatasan anggaran daerah



Elektronik (SPBE) sebagai upaya meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendukung pembangunan yang berbasis pelayanan. Namun, dalam praktiknya, peran teknologi digital ini belum sepenuhnya optimal karena menghadapi tantangan kompleks yang mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, ketergantungan pada stabilitas sistem, serta kesenjangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Selain itu, dari perspektif ekologi administrasi publik, efektivitas digitalisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, di mana perbedaan tingkat pendidikan dan rendahnya literasi digital masyarakat di wilayah tertentu menjadi hambatan utama dalam mengakses layanan tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan daerah yang lebih adaptif dan kontekstual dengan memperkuat sinkronisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar integrasi layanan tidak hanya bersifat tampilan luar, tetapi juga menyentuh aspek efisiensi operasional internal. Pemerintah Kota Cirebon perlu memperkuat political will melalui regulasi teknis yang tegas guna meminimalisir ego sektoral yang seringkali menghambat integrasi sistem. Secara sosial, pemerintah disarankan menginisiasi program literasi digital yang inklusif, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pinggiran kota, serta mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam antarmuka aplikasi untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap teknologi. Terakhir, aspek keberlanjutan menuntut alokasi anggaran yang proporsional untuk pengembangan SDM digital bagi ASN, sehingga pengelolaan SPBE dapat dilakukan secara mandiri tanpa bergantung terus-menerus pada pihak ketiga, demi mewujudkan ekosistem digital yang resilien dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Teknologi digital memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Cirebon. Namun, efektivitas pemanfaatannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, organisasi, dan teknologi yang melingkupinya. Pendekatan ekologi administrasi publik memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami peran teknologi digital dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang adaptif dan kontekstual menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah berbasis digital.

Saran

Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Cirebon memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kecanggihan infrastruktur teknologi, namun juga pada harmonisasi dengan ekologi birokrasi setempat. Pemerintah Kota Cirebon disarankan untuk memperkuat Political Will melalui regulasi turunan yang lebih teknis guna meminimalisir ego sektoral antar instansi. Sinkronisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menjadi prioritas utama agar integrasi layanan publik tidak hanya bersifat fasad atau tampilan depan saja, melainkan benar-benar menyentuh aspek efisiensi operasional di tingkat internal pemerintahan.

Selanjutnya, dalam perspektif ekologi administrasi, keberhasilan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan struktur sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Cirebon perlu menginisiasi program literasi digital yang inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pinggiran kota, agar kesenjangan digital tidak menghambat akses terhadap layanan publik. Pemanfaatan nilai-nilai lokal atau local wisdom dalam antarmuka aplikasi pelayanan dapat menjadi strategi jitu untuk meningkatkan akseptabilitas dan rasa memiliki masyarakat terhadap inovasi teknologi yang diluncurkan.

Terakhir, aspek keberlanjutan ekonomi dalam ekologi administrasi menuntut adanya alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan, bukan sekadar pengadaan

perangkat keras sesaat. Disarankan agar dilakukan investasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital di lingkungan ASN agar operasionalisasi SPBE tidak terus-menerus bergantung pada pihak ketiga. Dengan membangun ekosistem digital yang adaptif terhadap karakteristik lingkungan sosial-politik di Cirebon, pembangunan daerah berbasis teknologi akan lebih resilien dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga secara merata

DAFTAR PUSTAKA

(Times New Roman 12, Regular, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt).

Dwiyanto, A. (2017). Manajemen pelayanan publik.

Fountain, J. E. (2019). Building the virtual state: Information technology and institutional change. Washington, DC: Brookings Institution Press. *International Review of Administrative Sciences*, 82(1), 10–29.

Kementerian PANRB. (2019). Road map sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jakarta: KemenPANRB.

Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2016). Open government: Connecting vision and voice. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public management reform: A comparative analysis (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

UN E-Government Survey. (2020). Digital government in the decade of action. United Nations. Washington, DC.

World Bank. (2016). World development report: Digital dividends. Washington, DC.

WorldBank. (2021). GovTech maturity index.

Yildiz, M. (2020). Digital transformation of public administration. Government Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.